

ABSTRACT
MINISTER OF SOE
No. PER-01 / MBU / 2011 CONCERNING THE APPLICATION OF GOOD
GOVERNANCE (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) IN SOE
(Case Study at PT Perkebunan Nusantara IV)

N a m a : **Rudi Hartono**
I N M : **141803003**
Program : **Graduate Legal Studies**
Supervisor I : **Dr. Marlina, SH, M. Hum**
Supervisor II : **Muaz Zul, SH, M. Hum**

Good Corporate Governance can be understood as a set of regulations governing Limited Liability relationship between shareholders, management companies and other stakeholders with regard to the rights and obligations, one of which is the decision-making at the Board of Directors and Board of Commissioners. The provisions stipulated in the Regulation of the Minister of SOE No. PER-01 / MBU / 2011, the publication of these regulations ultimately aims to create corporate governance that provides added value for all parties.

The research method used is a normative legal research methods that are qualitative, such methods researchers conducted a discussion of the law in legislation through legal theories that found the answers to legal issues in accordance with applicable regulations.

Regulations that are the basis of the implementation of Good Corporate Governance, the rules used is Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies Act No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. One implementation of the application of Good Corporate Governance is how the mechanism of decision-making on the Board of Directors and the Board of Commissioners, which has been prescribed in the Code which is the infrastructure of Good Corporate Governance. These guidelines are a grip of Directors and the Board of Commissioners in decision making.

Barriers to implementation of Good Corporate Governance is composed of several factors, among others, legal, corporate culture and human resources, but the implementation of PT Perkebunan Nusantara IV remain committed. As part of its commitment to the forming section, which is responsible for monitoring and encouraging implementation of application in accordance with the provisions of the Law

Keywords: Regulation of the Minister of SOEs No.Per-01 / MBU / 2011, the Corporate Governance.

ABSTRAK
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI BUMN
NOMOR:PER-01/MBU/2011 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA YANG
BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*) PADA BUMN
(Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV)

N a m a : **Rudi Hartono**
N I M : **141803003**
Program : **Pascasarjana Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Dr. Marlina, SH, M.Hum**
Pembimbing II : **Muaz Zul,SH,M.Hum**

Good Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, salah satunya adalah pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris. Ketentuan diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011, terbitnya peraturan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, metode tersebut peneliti melakukan pembahasan tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui teori-teori hukum sehingga ditemukan jawaban permasalahan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Peraturan yang merupakan dasar dari penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*, peraturan yang dipergunakan adalah Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Salah satu implementasi penerapan Tata Kelola Yang Baik *Good Corporate Governance* adalah bagaimana mekanisme pengambilan keputusan pada Direksi dan Dewan Komisaris, yang telah diatur dalam Pedoman yang merupakan infrastruktur dari *Good Corporate Governance*. Pedoman tersebut merupakan pegangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengambilan keputusan.

Hambatan implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* terdiri beberapa faktor antara lain hukum, budaya perusahaan dan SDM, namun pelaksanaannya PT Perkebunan Nusantara IV tetap berkomitmen. Sebagai bentuk komitmennya dengan membentuk Bagian, yang bertugas memantau dan mendorong implemmentasi penerapannya sesuai dengan ketentuan Hukum

Kata Kunci: Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011, Tata Kelola Perusahaan.